

# Implementasi Program Edukasi Mitigasi Bencana Dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2023

*Implementation of Disaster Mitigation Education Program in Increasing Public Knowledge in Facing Flood Disasters at the Surakarta City Regional Disaster Management Agency in 2023*

Aktiffiani Energi Putri<sup>1</sup>, Aris Tri Haryanto<sup>2</sup>

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

energiputri13@gmail.com, aristh68@gmail.com

## Abstrak

Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk mendorong program edukasi mitigasi bencana, pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan program edukasi bencana banjir ini dilakukan oleh BPBD Daerah Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program edukasi mitigasi bencana banjir. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Surakarta selalu berupaya mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana akan tetapi terdapat kendala berupa komunikasi kebijakan yang dimana informasi yang belum tersampaikan secara jelas sehingga memicu timbulnya permasalahan mengenai pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Adapun saran untuk permasalahan diatas, masyarakat diharapkan mengikuti program edukasi mitigasi bencana banjir yang di adakan dan masyarakat diminta lebih aktif untuk melakukan tindakan evakuasi mandiri jika terjadi bencana sebelum bantuan itu datang.

**Kata kunci:** implementasi, mitigasi bencana banjir

## Abstract

*The Surakarta City Government is committed to promoting disaster mitigation education programs, the government and local governments are responsible for implementing disaster management. The implementation of this flood disaster education program is carried out by the Surakarta City Regional Disaster Management Agency. This study aims to describe the implementation of the flood disaster mitigation education program. This study uses the theory of George C. Edward III's Policy Implementation. This type of research is descriptive qualitative, the types of data used are primary data and secondary data, the determination of informants using purposive sampling techniques. Data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques*

*used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Surakarta City Regional Disaster Management Agency always strives to implement Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, but there are obstacles in the form of policy communication where information has not been conveyed clearly, triggering problems regarding public knowledge in dealing with flood disasters. As for suggestions for the above problems, the community is expected to follow the flood disaster mitigation education program that is being held and the community is asked to be more active in carrying out independent evacuation measures if a disaster occurs before assistance arrives.*

**Keywords:** implementation, flood disaster mitigation

## PENDAHULUAN

Bencana adalah musibah yang tidak dapat diprediksi keberadaannya dan banyak merugikan masyarakat. BNPB (2018) menyatakan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Indonesia adalah negara yang sering terkena bencana dari masa ke masa, mengingkat bahwa Indonesia masuk ke daerah rawan akan bencana, sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan bencana alam (Yulaelawati, 2008).

Kota Surakarta adalah salah satu kota yang masih mengalami banjir, kawasan banjir kota surakarta dapat dibagi menjadi empat kawasan utama diantaranya adalah : Kawasan Banjir Surakarta bagian Utara, yang terletak pada dataran rendah Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Joglo, Kelurahan Banyarsari dan Bantaran Kali Anyar. Kawasan Banjir Surakarta bagian Barat, yang terletak di Kelurahan

Laweyan, Kelurahan Bumi, Kelurahan Pajang. Kawasan Banjir Surakarta bagian Timur, yang terletak di Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Jebres, Kelurahan Sewu. Kawasan Banjir Surakarta bagian Selatan, yang terletak di Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Semanggi.

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, sedangkan kesiapsiagaan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi bencana banjir. Langkah yang harus dilakukan guna mengurangi dan mengantisipasi bencana banjir adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, guna mengurangi meningkatnya angka korban jiwa dan kerusakan fisik yang ditimbulkan akibat bencana banjir.

Bencana bajir tidak dapat dicegah, namun dapat dikendalikan dengan mengurangi dampak kerugian akibat bencana tersebut. Sehingga diperlukan penanganan yang cepat, tepat dan terpadu.

BPBD Kota Surakarta memiliki peran sangat penting dalam proses pengendalian banjir di Kota Surakarta, berbagai upaya telah dilakukan supaya Kota Surakarta terbebas dari banjir. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan kerja bakti di aliran sungai di daerah yang rawan akan sampah menumpuk, saling berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan buka tutup pintu air yang berada di beberapa titik di Kota Surakarta, serta pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas drainase kota

Pendidikan bencana banjir merupakan suatu kebijakan yang harus dilakukan atau diterapkan pada sekolah atau masyarakat yang daerahnya memiliki ancaman dan resiko terjadi banjir. Terkhusus untuk masyarakat yang berlokasi di daerah rawan memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana, maka dari itu pengurangan resiko bencana banjir sangat penting dilakukan. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat mengenali tanda-tanda awal bencana dan mengetahui tindakan yang harus diambil.

Bagian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Spasi tunggal/satu. Jenis huruf Book Antiqua. Ukuran huruf 12 poin. Marjin: normal.

Menurut Matar (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok

pemerintahan maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980: 10-11) keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Dimana faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Subarsono (2011), berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.
2. Sumber daya, yaitu perlunya SDM untuk melaksanakan proses implementasi kebijakan.
3. Disposisi, yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
4. Struktur birokrasi, yaitu bertugas mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur birokrasi adalah SOP dan fragmentasi.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Dewi, Evita Lylyana dan Suhharjo (2014), dengan judul "Mitigasi Bencana Banjir di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta". Adapun hasil dari

penelitian ini yaitu adanya bentuk mitigasi structural bencana banjir dan mitigasi *non-structural* di Kelurahan Nusukan Kecamatan banjarsari, Kota Surakarta. Bentuk mitigasi structural yaitu sumur resapan, perbaikan drainase atau gorong-gorong, dan pengeringan Sungai. Sedangkan mitigasi *non-structural* dilakukan oleh MUSRENGBANGKEL yang diadakan oleh pemerintahan kelurahan untuk meminimalisir bencana banjir dengan cara bekerja bakti.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih untuk memperoleh Gambaran secara jelas dan detail suatu keadaan terkait dengan peran BPBD Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di BPBD Kota Surakarta. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer yaitu hasil wawancara, sedangkan data sekunder yaitu berasal dari dokumen, surat, pengumuman, spanduk, foto, maupun video. Teknik penentuan informan yaitu menggunakan purposive sampling, artinya penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BPBD memiliki peran dalam program edukasi mitigasi bencana banjir yang sesuai dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang terdapat pada tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan keterlibatan umum dan bidang perlindungan Masyarakat. Untuk mendeskripsikan implementasi program edukasi mitigasi bencana dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat menghadapi bencana banjir pada BPBD dalam Sesuai teori yang dikemukakan oleh George Edward III yaitu implementasi kebijakan tidak terlepas dari peranan beberapa indikator-indikator yang dijalankan secara efektif, maka Implementasi Program Edukasi Mitigasi Bencana Dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir Pada BPBD Kota Surakarta Tahun 2023 dapat berjalan dengan kategori baik, selain itu tujuan kebijakan juga akan mudah diwujudkan. Indikator tersebut antara lain:

### 1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud merupakan kemampuan dalam menyampaikan perintah atau informasi kepada masyarakat tentang program edukasi mitigasi bencana banjir. Edukasi mitigasi bencana banjir dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu transmisi atau penyampaian, kejelasan, dan konsistensi. BPBD Kota Surakarta selalu berupaya memberikan

informasi terkait program edukasi mitigasi bencana banjir pada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.

**a. Transmisi program**

Penyampaian informasi secara langsung dilaksanakan melalui program KIE atau FGD seperti program edukasi mitigasi bencana banjir dengan cara sosialisasi yang melibatkan masyarakat dengan harapan informasi yang diberikan dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat, setidaknya untuk penanganan mandiri saat terjadinya bencana sebelum bantuan itu datang. Sedangkan secara tidak langsung yaitu melalui media sosial, dengan cara whatsapp pusdalops, instagram resmi BPBD Kota Surakarta maupun melalui website resmi BPBD Kota Surakarta. Dari segi komunikasi dapat dilihat bahwa penyampaian informasi terkait program edukasi mitigasi bencana sesuai dengan tujuan dan sasaran dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, hal ini menunjukkan bahwa implementor pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dengan tujuan yang akan dicapai dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada masyarakat yang daerahnya rawan bencana.

**b. Kejelasan Informasi**

Indikator kejelasan itu berkaitan dengan informasi yang diterima. BPBD Kota Surakarta memberikan informasi kepada masyarakat terkait materi yang berhubungan dengan program edukasi mitigasi bencana. Kejelasan informasi juga dapat mempermudah supaya dapat mengurangi risiko bencana, dengan cara mengikuti program KIE yang diberikan BPBD untuk masyarakat agar bisa penanganan mandiri sebelum bantuan itu datang. Kejelasan mengenai pelayanan dan informasi yang diberikan tentang program edukasi mitigasi bencana bahwa jelas atau tidaknya dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri yang mengikuti sosialisasi program edukasi mitigasi bencana apakah bisa menerapkan edukasi mitigasi bencana nya atau tidak.

**c. Konsistensi Informasi**

BPBD memberikan informasi program edukasi mitigasi bencana banjir kepada Masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung melalui kegiatan sosialisasi yang rutin diadakan baik program KIE maupun FGD hal ini diharapkan agar masyarakat mampu memahami dan mengerti akan program KIE yang diberikan. Sosialisasi yang diselenggarakan BPBD

memberikan informasi terkait edukasi mitigasi bencana seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu pencegahan bencana, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Kegiatan ini dilakukan di wilayah yang sering terdampak banjir, dan Masyarakat diimbau untuk membentuk DESTANA (Desa Tangguh Bencana).

## 2. Sumber Daya

Sumber daya bermaksud untuk mengevaluasi sumber daya pada BPBD dalam melaksanakan program edukasi mitigasi bencana banjir. Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari BPBD Kota Surakarta telah berkompeten baik dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan setiap pegawai yang ada mendapatkan pembinaan untuk pemberian layanan yang maksimal bagi Masyarakat.

### a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah elemen penting untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Sarana dan prasarana adalah dua hal yang saling menunjang antara yang

satu dengan yang satunya. sehingga tanpa adanya sarana dan prasarana akan menghambat keberhasilan implementasi program edukasi mitigasi bencana dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat menghadapi bencana banjir pada BPBD Kota Surakarta tahun 2023. Sarana dan prasarana yang ada di BPBD diantaranya Perahu Polyethylene 2, Perahu Fiber 2, Kapal LCR 2, Mobil Pump BNPB 2, Postable Water Pump 23hp 5, Portable Water Pump 6hp 10, Mobil dapur umum. Terkait sarana dan prasarana di BPBD sudah baik dalam memberikan pelayanan dan BPBD berupaya memberikan fasilitas yang memadai dalam penyelenggaraan program edukasi mitigasi bencana banjir seperti simulasi/peragaan, APD (Alat Pelindung Diri), narasumber atau fasilitator yang ahli.

### b. Dana atau Insentif

Insentif berdampak pada kinerja para pelaksana kebijakan dengan harapan bahwa adanya insentif akan mendorong para pelaksana untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Pelayanan yang disediakan kepada masyarakat diselenggarakan tanpa dikenakan biaya, tidak ada pemberian insentif kepada pegawai pemberi layanan

karena sudah mendapatkan gaji dari pemerintah sesuai dengan peraturan.

### 3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BPBD Kota Surakarta dalam mengimplementasikan penyelenggaraan program edukasi mitigasi bencana banjir dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memiliki komitmen dengan memberikan informasi dan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan program edukasi mitigasi bencana banjir.

#### a. Tingkat Dukungan atau Partisipasi

Partisipasi adalah turut berperan dalam sebuah kegiatan, keikutsertaan dalam melakukan observasi, berupa pengamatan yang aktif dan turut serta dalam kehidupan lapangan atau objek yang diamati. BPBD Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan program edukasi mitigasi bencana didukung oleh masyarakat dan sangatlah senang karena bisa meminimalisir adanya kerusakan atau kerugian.

#### b. Sikap Pelaksana

Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik apabila para pelaksana memahami apa yang harus dikerjakan, serta mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Badan Penanggulangan Bencana Kota Surakarta dalam melalukan pelayanan sangatlah baik dan

profesional juga bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan. BPBD Kota Surakarta menempatkan pegawai yang berkompeten untuk melayani masyarakat dan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. Dalam menjalankan tugas, BPBD menjalankannya telah sesuai dengan motto yaitu "Gerak Terpadu Tanggap, Tangguh Menghadapi Bencana".

### 4. Struktur Birokrasi

#### a. Pembagian Tugas dan Tanggungjawab

Pembagian tugas dan tanggungjawab memiliki arahan atau petunjuk tentang apa yang harus dikerjakan. Melindungi masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan. Pegawai bertanggung jawab atas tugas apa yang diberikan pada bidang masing-masing, termasuk Sekretariat, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi maupun TRC (Tim Reaksi Cepat).

#### b. Koordinasi dan Kolaborasi

Koordinasi dan kolaborasi adalah salah satu kegiatan penting untuk mencapai tujuan

kegiatan Bersama. Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD melibatkan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana, seperti PMI, TNI, POLRI, dan Relawan.

### c. Penilaian Kinerja

SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah alat penting untuk mengatur operasi sehari-hari dalam suatu organisasi, memastikan bahwa semua anggota tim bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan menjaga kualitas serta efisiensi dalam berbagai aktivitas. SOP program edukasi mitigasi bencana pada saat sosialisasi maupun penanganan kejadian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. SOP digunakan untuk meningkatkan mutu kualitas layanan dengan tujuan agar pelayanan menjadi cepat, efektif dan memberikan kejelasan.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Program Edukasi Mitigasi Bencana Dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Banjir pada BPBD Kota Surakarta Tahun 2023 beserta hasil tinjauan masalah berdasarkan teori George C. Edward III, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aspek komunikasi membuktikan

bahwa informasi berkaitan dengan program edukasi mitigasi bencana banjir sudah disampaikan melalui program KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) maupun FGD, Instagram, tiktok, WhatsApp dan melalui website resmi BPBD Kota Surakarta.

2. Aspek sumber daya menunjukkan bahwa BPBD Kota Surakarta telah menyediakan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan program edukasi mitigasi bencana banjir, termasuk sarana dan prasarana.
3. Aspek disposisi dalam implementasi mengenai program edukasi mitigasi bencana banjir tidak membutuhkan biaya atau tidak dipungut biaya, dan pelayanan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa terdapat tugas dan tanggung jawab secara jelas untuk pegawai dan melibatkan Masyarakat sebagai penilaian kinerja dari BPBD Kota Surakarta dalam layanan sarana, penilaian kepuasan, dan saluran pengaduan yang dimana hasilnya menjadi bahan evaluasi serta koordinasi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- D.S. van Meter & C.E., van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process A Conceptual Framework",

- Administration & Society,  
6(4), 445-488. hlm. 447
- Dewi, E. L. (2014). *Mitigasi Bencana Banjir Di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsai Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congresional Quarter Press.
- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., United States of America
- Efendi, A. P. J. (2022). *Strategi Penanganan Mitigasi Bencana Banjir Berdasarkan Tingkat Kerawanan di Kabupaten Pemalang* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Eyestone, Robert. 1971. *The Threads of Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey
- Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P  
<https://bpbd.surakarta.go.id/> diakses pada Kamis, 20 Februari 2025  
<https://www.bnrb.go.id/> diakses pada Kamis, 20 Februari 2025
- Irawan, R. (2016). *Program Dinas Pekerjaan Umum Dalam Penanggulangan Banjir Di Daerah Antasari Di Kota Samarinda*. Jurnal Administrasi Negara, 4(1), 2101 2113.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sabatier, Paul A. 1986. *Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis*. Journal of Public Policy 6 (01): 21-48.  
doi:10.1017/S0143814X00003846.
1998. "The Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe." Journal of European Public Policy 5 (1): 98-130.  
doi:10.1080/13501768880000051

- Smith, T. B. (1973) "The policy implementation process." *Policy Sciences* 4: 197-209
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatig, dan R&D*, penerbit Alfabeta,Bandung
- Sutama (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan R&D*. Surakarta: Fairus Media
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggraraan Pemerintah Daerah
- WATI, A. (2018). *Mitigasi Bencana Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Babat*. Skripsi, Universitas Brawijaya.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita
- Wulandari, K. (2022). *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengendalian Banjir Di Kota Surakarta*. Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 6(1).
- Yulaelawati, E. (2008). *Mencerdasi bencana: banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, gunung api, kebakaran*. Grasindo